DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, J. 2012. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan *Good Governance*. *Jurnal Nasional Terakrditasi*. Universitas Siliwangi . Tasikmalaya.

Bastian, I. 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.

Etika, D, & Setyowati, R. N. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya Untuk Meningkatkan Partisipasii Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal akuntansi*. Universitas Negri Surabaya.

Fahmi, I. 2013. Perilaku Organisasi. Alfabeta. Bandung.

Fitiani 2017. Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumbang Periode Tahun 2014-2016. Skripsi. Universitas Muhammadiyah .Makassar.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

Hardiwinoto. 2017.*Good government Governance.https://hardiwinoto.com/good-government-governance.*

Hermansayah, I. R.M, dan M. Suherman. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi.Tasikmalaya.

Indrayani, dan Khairunnisa. 2018.Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode

2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Aceh.

LAN dan BPKP. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Cetakan Pertama. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

_____. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

_____. 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Jakarta.

_____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE.Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.

Mardiasmo, Prof. DR. Mba, AK. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta

_____2018. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.

Marwansyah. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Alfabeta.Bandung.

Nada, S.L. 2016. Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Value For Money* (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*. Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

Purwiyanti, D. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Tadulako. Sulawesi.

Rismawati. & Mattalata. (2018). Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan. Makassar : Celebes Media Perkasa.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance* "Kepemerintahan Yang Baik" (2 ed.). Mandar Maju. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Sekaran, U. 2006.Metode Penelitian Untuk Bisnis. Buku 1. Edisi ke-4.Salemba Empat.Jakarta.

Sugandi, Y.S. 2011. Administrasi Publik : Konsep dan Perkrmbangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Wildani, R. W. 2019. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* pada Dinas Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu. J*urnal Akuntansi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Wuwungan, G.T, J. Tinangon, & S. Rondonuwu. 2019. Penerapan Metode *Value For Money* Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Yuliono, R. N. 2019. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi Empiris Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*. Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Krina L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasii. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sabarno. H. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126. Jakarta.